



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MODUL 4
TAHAP PENGKAJIAN & MITIGASI / ALTERNATIF

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

PELATIHAN KLHS RPJMD
Jogjakarta, 22 – 24 MARET 2016



Tujuan

- Melakukan kajian akademis dari rancangan RPJMD yang berpotensi memberikan pengaruh, terutama yang mempunyai resiko terhadap lingkungan hidup dalam konteks isu-isu strategis dan pembangunan berkelanjutan
- Mengembangkan mitigasi dan/atau alternatif mengurangi potensi pengaruh negatif (resiko) pelaksanaan indikasi program prioritas untuk meningkatkan kualitas RPJMD

Pelaku

- Pokja PL melakukan pengkajian bersama narasumber/TA yang kompeten sesuai isu strategis yang dikaji.
- Hasil pengkajian dan mitigasi/alternatif disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk mendapat saran penyempurnaan



MUATAN KAJIAN, a.l.

- 1 | Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- 2 | Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- 3 | Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- 4 | Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5 | Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- 6 | Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 16, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Catatan:

- Tingkat kedalaman kajian sangat relatif, tergantung pada ketersediaan sumberdaya manusia, anggaran, dan waktu.
- Metodologi pengkajian ditentukan oleh Tim KLHS daerah dan narasumber sesuai dengan kebutuhan



METODE KAJIAN | I. Analisis Substansi

A. PRINSIP KETERKAITAN

- Internal
- Vertikal
- Horizontal

B. PRINSIP KESEIMBANGAN

- Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan

C. PRINSIP KEADILAN

- Antar Kelompok Masyarakat
- Antar Generasi



RPJMD

- **Visi dan Misi**
- **Tujuan dan Sasaran**
- **Strategi dan Arah Kebijakan**
- **Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**

RPJPD

- **Visi dan Misi**
- **Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan**

I. ANALISIS SUBSTANSI | I. A. Prinsip Keterkaitan

Mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah dan implikasinya:

- *Permukaan bumi bersifat kontinum, bukan diskrit : Saling terkait dan Saling mempengaruhi* → *ada inter-relasi keruangan*
- *Hakekat hubungan antar wilayah : saling melengkapi, sekaligus saling bersaing* → *harus ada Integrasi keruangan*

Apa yang dinilai?

- Keterkaitan fisiografi (komponen fisik alami) kabupaten dengan kabupaten sekitarnya;
- Implikasi keterkaitan fisiografi terhadap usulan program dan kebutuhan kerjasama wajib antar kabupaten

I. ANALISIS SUBSTANSI | I. A. Prinsip Keterkaitan

Catatan tentang fragmentasi pemerintahan:

1. **Fragmentasi di pusat:**

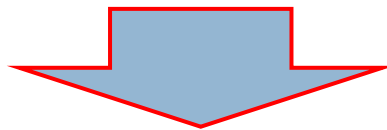
pendekatan sektoral yang cenderung terlalu kuat; masing2 kementerian relatif otonom; diperparah oleh afiliasi politik Menteri yang beragam, & koalisi pemerintah yang rapuh.

2. **Fragmentasi Pusat turun ke daerah:**

Masing-masing kementerian hadir sendiri-sendiri di daerah.

3. **Fragmentasi antar Level Pemerintahan:**

Pusat hadir di daerah dengan Dekonsentrasinya, Provinsi & Kabupaten/Kota dengan otonominya (produk desentralisasi pusat)



**PENDEKATAN PEMBANGUNAN:
HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL**

I. ANALISIS SUBSTANSI | I. A. Prinsip Keterkaitan

Mempertimbangkan keterkaitan vertikal:

- *Tercapainya misi pembangunan nasional ditentukan oleh operasionalisasi di tingkat K/L – Provinsi – Kab/Kota;*
- *Menyesuaikan misi, kebijakan dan program nasional ke kebutuhan daerah (Provinsi/Kabupaten & Kota) sesuai isu strategis prioritas daerah.*

Apa yang dinilai?

- Sinkronisasi Nawacita/Agenda Prioritas (nasional – Provinsi – Kabupaten) dengan isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten;
- Merumuskan diskripsi isu strategis dan hasil baseline analysis yang mendesak ditangani, sesuai urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah

I. ANALISIS SUBSTANSI | I. A. Prinsip Keterkaitan

Mempertimbangkan keterkaitan horisontal/sektoral:

- Misalnya keterkaitan sektor prasarana dengan sektor pertanian dan sektor perdagangan.
- Keterkaitan kepentingan antar pemangku kepentingan di tkt kabupaten, pemangku kepentingan tingkat Kabupaten dgn pemangku kepentingan sejenis tkt provinsi

Apa yang dinilai?

- Keterkaitan program sektor/sub sektor agar sinergis (Mis. sub sektor pertanian dgn sub sektor perdagangan dan sub sektor prasarana jalan dan transportasi) dengan capaian yang telah ditentukan.
- Keterkaitan produk sektor-sektor tertentu kabupaten dengan wilayah kabupaten sekitarnya;

I. ANALISIS SUBSTANSI | I. A. Prinsip Keterkaitan

Mempertimbangkan keterkaitan antar waktu:

- Keterkaitan rangkaian waktu pelaksanaan RPJMD di dalam rentang waktu (5 tahunan) jangka panjang RPJPD dan RTRW);
- Keterkaitan isu strategis saat penyusunan RPJMD dengan muatan RPJMD periode sebelumnya.

Apa yang dinilai?

- Keberhasilan, kendala dan program yg belum ditangani pada periode 5 tahun sebelumnya; kontribusinya terhadap isu strategis saat ini; di verifikasi melalui baseline analysis.

I. ANALISIS SUBSTANSI | I. A. Prinsip Keterkaitan

Contoh Tabel Kajian Keterkaitan Internal RPJPD dan RPJMD Kabupaten

RPJPD Kab. Pakpak Bharat	RPJMD Kab. Pakpak Bharat	Catatan
Visi dan Misi	Visi dan Misi	
Tujuan dan Sasaran	Tujuan dan Sasaran	
Strategi dan Arah Kebijakan	Strategi dan Arah Kebijakan	
-	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	

I. ANALISIS SUBSTANSI | I. A. Prinsip Keterkaitan

Contoh Tabel Kajian Keterkaitan Internal RPJMD dan RTRW Kabupaten





RPJMD Kab. Pakpak Bharat	RTRW Kab. Pakpak Bharat	Catatan
Visi dan Misi		
Tujuan dan Sasaran	Tujuan	
Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan dan Strategi	
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	Rencana Pola Ruang dan Rencana Struktur Ruang	
Indikasi Program Prioritas	Indikasi Program	

I. ANALISIS SUBSTANSI | I. A. Prinsip Keterkaitan

Contoh Tabel Kajian Keterkaitan Horizontal dengan RPJMD Kab. Sekitarnya

RPJMD Kab. Pakpak Bharat	RPJMD Kab. Dairi	RPJMD Kab ke-n	Catatan
Visi dan Misi	Visi dan Misi	Visi dan Misi	
Tujuan dan Sasaran	Tujuan dan Sasaran	Tujuan dan Sasaran	
Strategi dan Arah Kebijakan	Strategi dan Arah Kebijakan	Strategi dan Arah Kebijakan	
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	

I. ANALISIS SUBSTANSI | I. A. Prinsip Keterkaitan

Contoh Tabel Kajian Keterkaitan Vertikal RPJMD					
Dokumen Perencanaan	Substansi yang Dikaji				Catatan
	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum & Prog Pembangunan	
RPJM Nasional *					
RPJMD Provinsi Sumut					
RPJMD Kab. Pakpak Bharat					

- ▶ Nomenklatur RPJMN 2015-2019: visi dan misi, strategi, 9 agenda prioritas & sasaran pokok
- ▶ Permendagri 54/2010 tentang tata cara penyusunan RPJPM sedang dalam tahap revisi

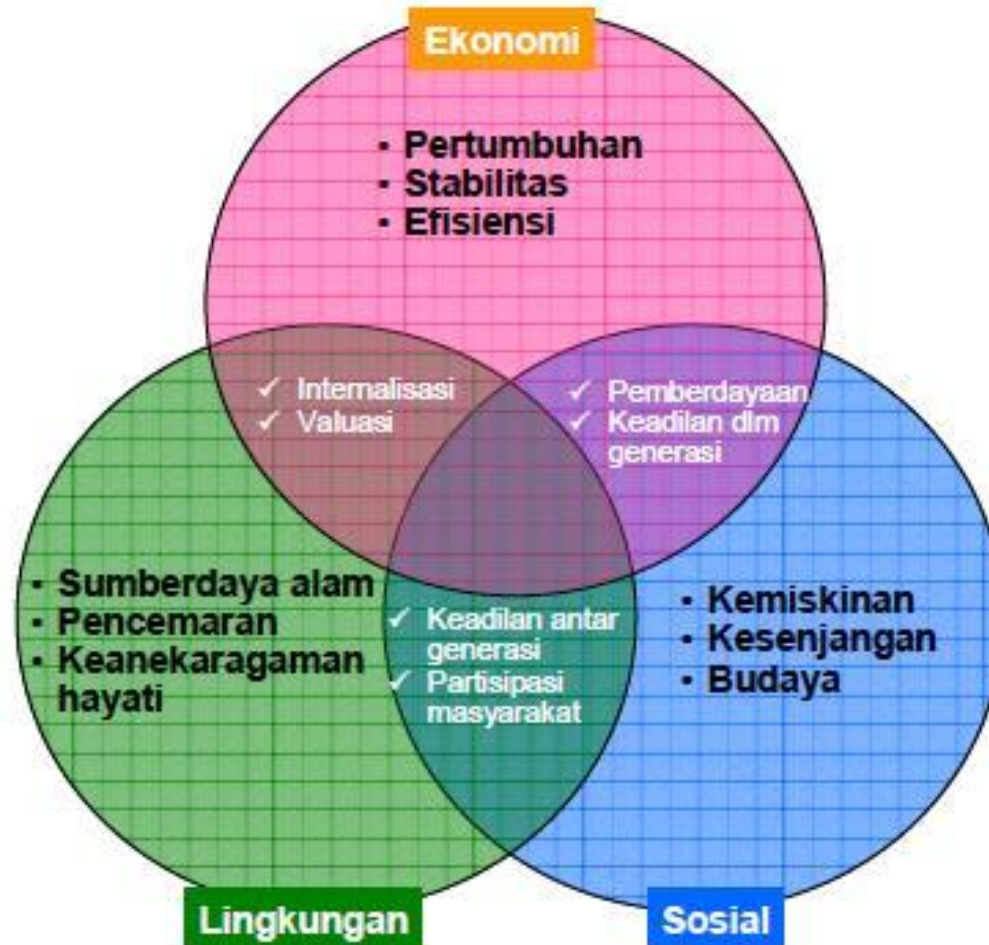
I. ANALISIS SUBSTANSI | I. B. Prinsip Keseimbangan



Keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup dalam satu daerah kajian (provinsi/kabupaten/kota).

Keseimbangan → Proporsional sesuai dengan karakteristik wilayah, termasuk wilayah sekitarnya secara fungsional

I. ANALISIS SUBSTANSI | I. B. Prinsip Keseimbangan





SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



The Detail of Intersections

Nawa Cita	RPJMN	SDGs
<p>N1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.</p>	<p>Bab 6.1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif • Memperkuat sistem pertahanan • Memperkuat jatidiri sebagai negara maritim • Meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri • Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran • Memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional • Meminimalisasi dampak globalisasi • Membangun industri pertahanan nasional • Membangun polri yang profesional • Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan 	<p>G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia. G10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara. G16 Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan bagi semua dan membangun pranata-pranata yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. G17 Memperkuat cara-cara penerapan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.</p>
<p>N2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.</p>	<p>Bab 6.2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik • Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan • Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan • Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) • Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik 	<p>G16 Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan bagi semua dan membangun pranata-pranata yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.</p>

(tabel bersambung)

I. ANALISIS SUBSTANSI | I. B. Prinsip Keseimbangan

Contoh Instrumen Kajian Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

No	RPJMD	Prinsip Keseimbangan			Catatan Perbaikan
		Ekonomi	Sosial	LH	
1.	Visi dan Misi				
2.	Tujuan dan Sasaran				
3.	Strategi dan Arah Kebijakan				
4.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah				

I. ANALISIS SUBSTANSI | I. C. Prinsip Keadilan

Keadilan antar kelompok masyarakat & generasi.
Menitikberatkan pada pencapaian kesejahteraan yang lebih baik dan merata bagi seluruh pemangku kepentingan.



Pemerataan untuk mendapatkan manfaat pembangunan

Kemudahan memperoleh akses pemanfaatan SDA dan memperoleh manfaat dari kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan lestari

I. ANALISIS SUBSTANSI | I. C. Prinsip Keadilan

Contoh Instrumen Kajian Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

No	RTRW	Prinsip Keadilan		Catatan Perbaikan
		Antar Pokmas	Antar Generasi	
1.	Visi dan Misi			
2.	Tujuan dan Sasaran			
3.	Strategi dan Arah Kebijakan			
4.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah			

Metode Kajian: | II. Kajian Pengaruh

**PERKIRAAN
PENGARUH/DAMPAK
TERHADAP ISU STRATEGIS
KLHS DAN PERKIRAAN
MITIGASI/ALTERNATIFNYA**



- **Indikasi Program
Prioritas RPJMD**

2. KAJIAN PENGARUH |

Mengkaji pengaruh indikasi program prioritas RPJMD terhadap isu-isu strategis.

Kajian ini dapat dilaksanakan dengan berbagai instrumen analisis, diantaranya dicontohkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan Indikasi Program Prioritas yang akan Dikaji (penapisan)

- ▶ Pemilihan indikasi program yang akan dikaji dengan menggunakan kriteria memiliki pengaruh/dampak dengan isu-isu strategis.
- ▶ Dampak positif (+) apabila program berkontribusi dalam menangani isu; Dampak negatif (-) apabila program memperburuk isu; dan (0) apabila program tidak terkait dengan isu; dan (?) apabila tidak jelas dampaknya
- ▶ Pemilihan indikasi program ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen matriks.

Contoh Matriks Penapisan Program

Isu-Isu Strategis Indikasi Program	TAPUT semakin Panas	Degradasi ekosistem Kawasan Hutan	Besarnya area lahan kritis	Menurunnya a kualitas dan kuantitas air	Tingginya konflik sosial	Rendahnya kesejahteraan petani
Pembangunan infrastruktur jalan	-	-	-	-	+	+
Pengembangan kawasan pertanian	-	-	+	-	+	+
.....						
Program.....n						

Pengkajian Pengaruh

2. Mendeskripsikan dan Merangkum Hasil Kajian Pengaruh

- ▶ Pokja PL mendeskripsikan pendugaan pengaruh dan menyiapkan rangkuman semua perkiraan pengaruh termasuk lokasi perkiraan dampak dalam tabel kerja.
- ▶ Pokja PL melakukan verifikasi dan klarifikasi yang bernilai (?) kepada para ahli atau pemangku kepentingan terkait sehingga dapat diputuskan langkah selanjutnya.

Pengkajian Pengaruh

3. Menentukan Dampak Strategis

- ▶ Pokja PL menentukan dampak strategis dengan kriteria.
- ▶ Dampak strategis jika memenuhi kriteria a.l. memiliki
 - a. dampak langsung dan turunan
 - b. dampak lintas wilayah
 - c. dampak lintas sektor
 - d. dampak kumulatif
- ▶ Dampak strategis dilengkapi dengan **analisis yang lebih dalam** termasuk menggunakan **analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis** untuk memperkirakan wilayah terkena dampak.

Pengkajian Pengaruh

4. Mengidentifikasi Pengaruh Dampak Program terhadap Pencapaian Visi dan Misi RPJMD

- ▶ Pokja PL membandingkan dampak program dengan visi dan misi RPJMD.
- ▶ Pokja PL mengidentifikasi visi dan misi yang terhambat pencapaiannya oleh dampak program yang diperkirakan akan timbul

MITIGASI DAMPAK

Mitigasi

- ▶ berupa usulan-usulan tambahan untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian.
- ▶ pastikan mitigasi yang disarankan tidak akan menimbulkan dampak negatif baru.

Rumusan Mitigasi

- ▶ memuat program/kegiatan baru yang menggambarkan langkah-langkah yang bersifat preventif terhadap perkiraan dampak.

Rumusan Mitigasi pada RPJMD

- ▶ disajikan dalam daftar mitigasi yang menjadi bagian dari matriks pengkajian pengaruh

ALTERNATIF PROGRAM

Alternatif Program Pembangunan

- ▶ dirumuskan jika dampak negatif program tidak dapat dimitigasi.
- ▶ merupakan usulan-usulan program pengganti untuk menghilangkan, meminimalkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian.

Pembandingan Alternatif

- ▶ mengkaji dampak dari usulan program pengganti dan bandingkan dengan dampak dari program semula (pilihan skenario).

Perumusan Alternatif

- ▶ mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

CONTOH FORMAT KAJIAN DAMPAK PROGRAM PRIORITAS

KAB TAPANULI UTARA 2015

Program Pembangunan Sistem Prasarana Perhubungan

KOMP LH	PENGAJIAN PENGARUH				LOKASI	TUJUAN & KEBIJAKAN TERPENGARUH	MITIGASI	
	Deskripsi Dampak	Turunan	Antara Wil	Kumulatif				Antar Sek
Degradasi kawasan & ekosistem hutan.	<p>Peningkatan dan pembukaan prasarana jalan akan memicu pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan dan permukiman dan meningkatkan potensi ladang berpindah, pembalakan dan kebakaran di kawasan hutan.</p> <p>Akibat yang ditimbulkan – degradasi kawasan hutan dan ekosistemnya.</p> <p>Dampak Turunan Degradasi kawasan ekosistem hutan akan menyebabkan jasa lingkungan dari kawasan ekosistem hutan menurun dan akan berimbas pada menurunnya kualitas dan kuantitas air permukaan, meningkatnya lahan kritis/terbuka, aspek sosial ekonomi (menurunnya produktivitas pertanian, perikanan, industri RT, industri, tenaga kerja, kesehatan), dan aspek ekosistem (biodiversity), serta penurunan produktivitas pertanian dalam arti luas dan penurunan daya dukung lingkungan dan perubahan iklim makro.</p>	(-)	(-)	(-)	(-)	<p>Kawasan Hutan Tapanuli Utara:</p> <p>Peta Perubahan kawasan hutan dari SK Menhut No. 44/menhut-II/2005 ke SK Menhut No. 579/Mehut-II/2014.</p>	<p>TUJUAN</p> <p>Membuat rencana tata ruang berbasis pertanian dan agroindustri dan energi (Sarulla), <u>produktif, efisien, aman, dan menyenangkan</u>, dan <u>pembangunan berkelanjutan</u>.</p> <p>KEBIJAKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup.</u> • Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan budidaya <u>sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.</u> • Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan <u>daya dukung lahan.</u> • <u>Peningkatan Ekonomi</u> Masyarakat berbasis sumber daya alam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan DAS secara kontiniu dan tepat sasaran. • Penentuan program kegiatan sesuai dengan karekteristik biofisik wilayah. • Studi kelayakan PES. • Kajian Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) • Pengelolaan DAS secara kontiniu dan tepat sasaran. • Membuat satu program teknologi pertanian yang berguna utk masyarakat agar tidak terjadi penebangan hutan karena minimya pendapatan masyarakat dlm pertanian. • Membuat program sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya kawasan hutan agar tetap terjaga. • Program pemberian bibit kemenyan pada masyarakat agar ditanam karena kemenyan dapat tumbuh berdampingan pada pohon2 di kawasan hutan. • Menetapkan pilihan pembangunan, apakah pembangunan dibidang pertanian, maka dibuatlah program pertanian yang ekologis yang tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. • Selektif dalam pemberian izin dibidang pertambangan.

CONTOH ALTERNATIF PROGRAM

Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Perumusan Mitigasi/Alternatif	
		Mitigasi	Alternatif
Pembangunan jalan untuk jalur angkutan barang terpisah dari jalur transportasi umum (Ps. 50 ayat 2)	Dampak terhadap penggunaan lahan sawah	NA	Pembangunan jalan layang pada wilayah persawahan
	Dampak terhadap perumahan yang telah terbangun	Program permukiman kembali penduduk	Penyesuaian trase badan jalan di kawasan terbangun
Pembangunan jalan arteri primer (Ps. 60 4d)	Dampak terhadap penggunaan lahan sawah	NA	Pengalihan trase jalan
	Dampak terhadap lahan basah	NA	Pembangunan jalan layang pada wilayah lahan basah
	Dampak terhadap kawasan cagar alam	NA	Pengalihan trase jalan

KONSULTASI PUBLIK

Mengkonsultasikan hasil kajian dan langkah mitigasi/alternatif dengan pemangku kepentingan untuk terpenuhinya aspek partisipatif.

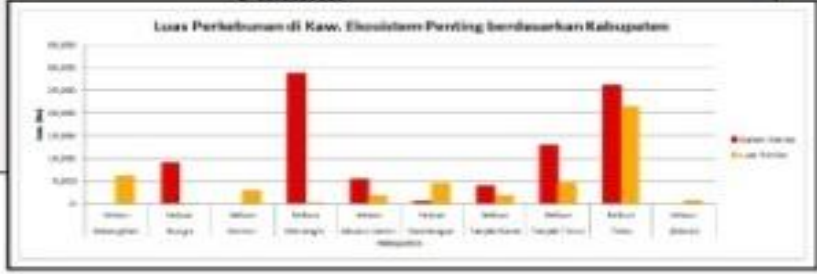
CONTOH PENGKAJIAN PENGARUH RTRW PROVINSI JAMBI

METODE:
SUPERIMPOSED dan PEMETAAN PARTISIPATIF

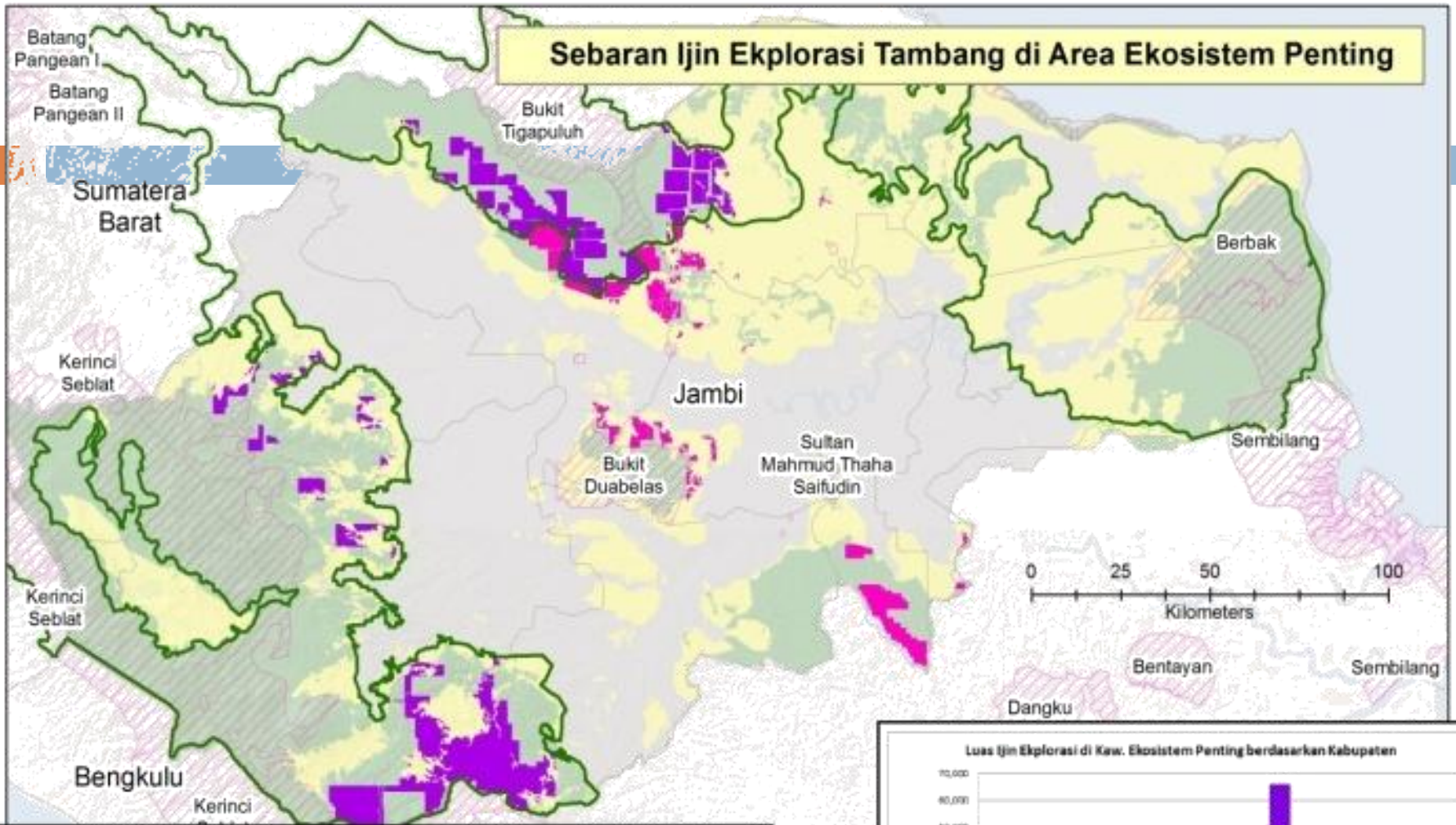


Legend

- Batas Kabupaten
- Area Rimba
- Daerah Konservasi
- Lokasi perkebunan Vision Sumatra**
 - Dalam Rimba
 - Luar Rimba
- Kawasan Ekosistem Penting
- Jaringan Ekosistem
- Kawasan Pembangunan



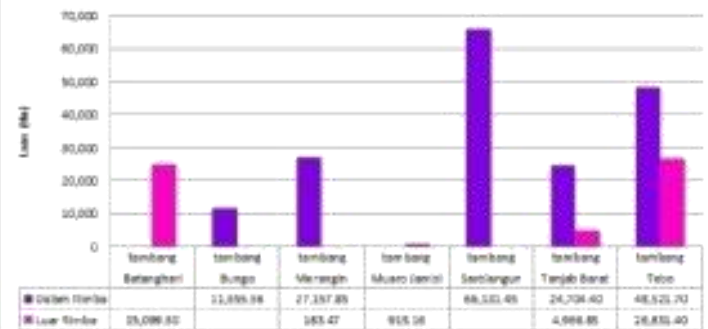
Sebaran Ijin Eklporasi Tambang di Area Ekosistem Penting



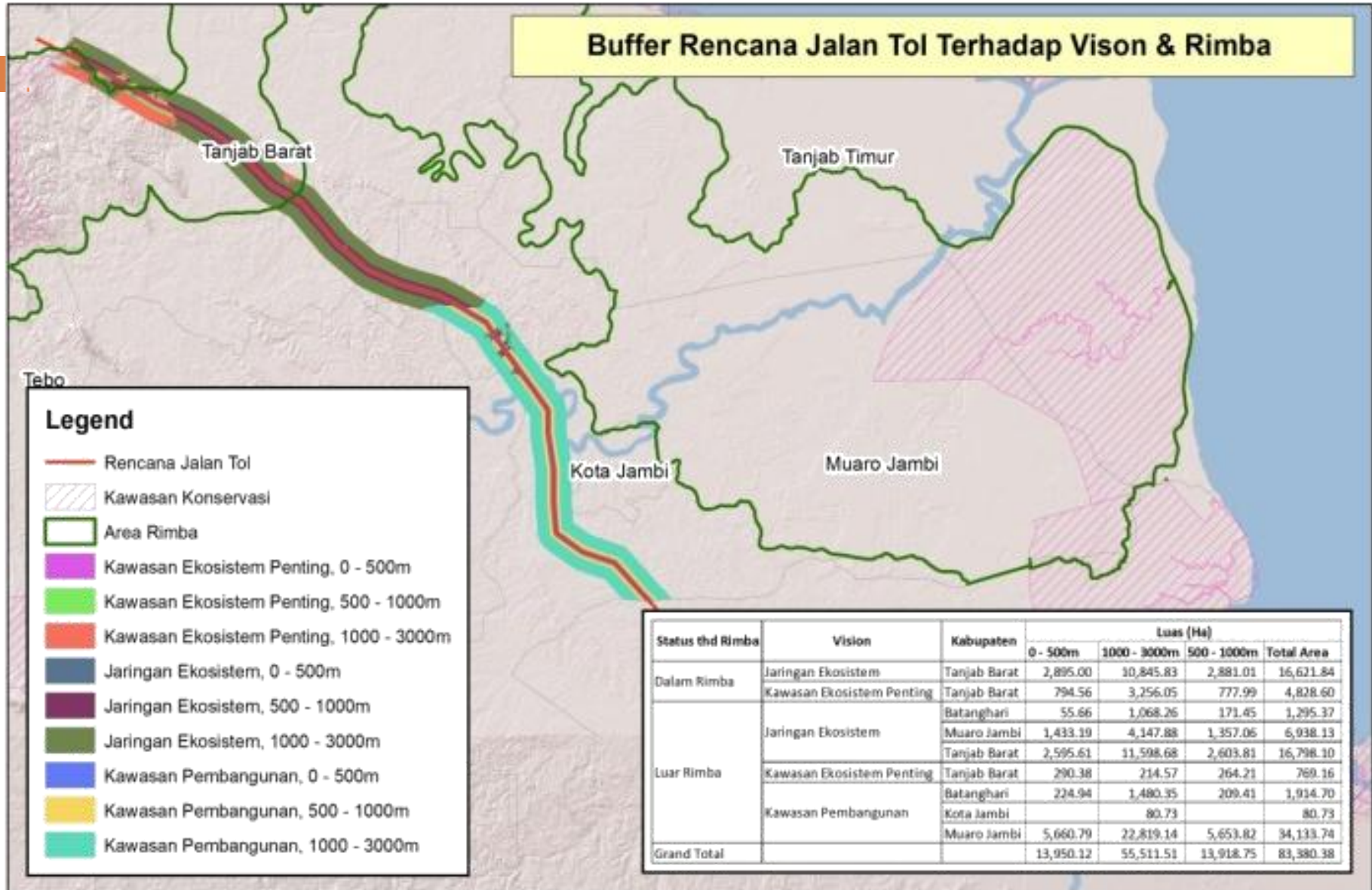
Legend

	Batas Kabupaten	Ekplorasi Tambang Vision Sumatra	
	Area Rimba		Dalam Rimba
	Daerah Konservasi		Luar Rimba
			Kawasan Ekosistem Penting
			Jaringan Ekosistem
			Kawasan Pembangunan

Luas Ijin Eklporasi di Kaw. Ekosistem Penting berdasarkan Kabupaten



Pengaruh Kebijakan MP3EI terhadap Vision & RIMBA



Pengaruh kebijakan MP3EI terhadap vision & RIMBA

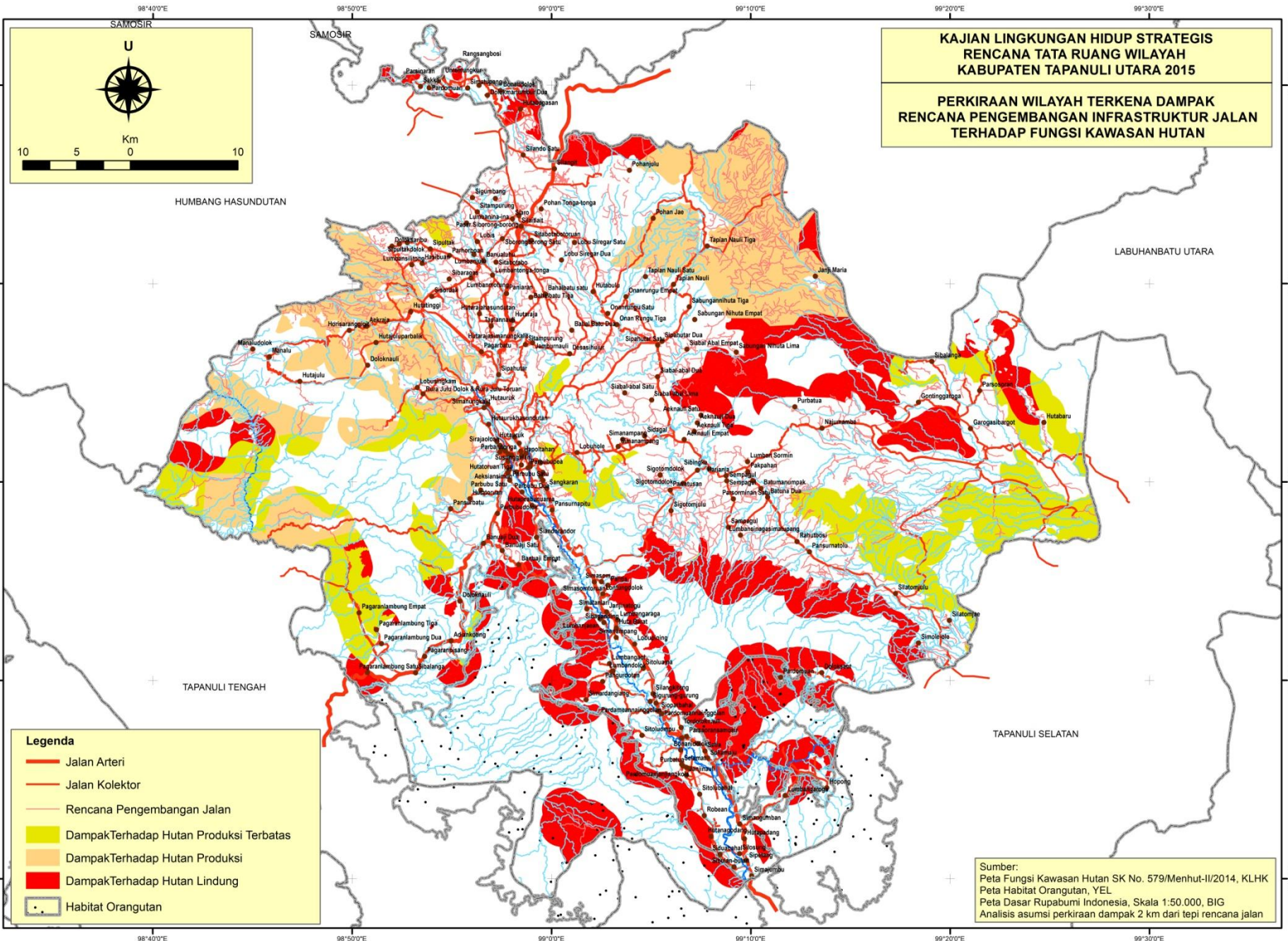
Buffer Rencana Jalan Kereta Terhadap Vison & Rimba



Status thd Rimba	Visi	Kabupaten	Luas (Ha)			
			0 - 500m	500 - 1000m	1000 - 3000m	Total Area
Dalam Rimba	Jaringan Ekosistem	Kota Jambi	0.92		3.57	4.49
		Muaro Jambi	2,253.57	9,711.61	2,482.75	14,447.93
		Tanjab Barat	3,696.88	13,663.45	3,553.28	20,913.61
		Tanjab Timur	869.13	3,967.34	676.19	5,512.66
		Tebo	29.88	493.04	44.42	567.34
		Muaro Jambi		132.77		132.77
	Kawasan Ekosistem Penting	Tanjab Barat	575.82	5,135.40	792.48	6,503.69
		Tanjab Timur	265.53	1,287.50	386.35	1,939.38
		Tebo	1,025.39	4,105.93	1,025.04	6,156.35
	Kawasan Pembangunan	Kota Jambi	1.59	53.02	6.92	61.53
		Muaro Jambi	2,017.80	6,770.01	2,003.68	10,791.49
		Tanjab Barat	6.66	38.66	5.74	51.06
Tanjab Timur		0.32	0.20	0.17	0.68	
No Data		52.33	415.12	59.87	527.32	
Luas Rimba	Jaringan Ekosistem	Batanghari		78.46		78.46
		Bungo	10.14	88.89	59.71	158.75
		Kota Jambi	574.04	38.75	190.38	803.15
		Muaro Jambi	3,079.84	7,704.85	3,014.76	13,799.44
		Tanjab Barat	2,629.16	12,965.48	2,605.68	18,100.32
		Tanjab Timur	2,758.13	10,047.33	2,756.98	15,562.45
	Kawasan Ekosistem Penting	Tebo	461.60	2,627.15	491.72	3,580.46
		Muaro Jambi		63.39		63.39
		Tanjab Barat	258.91	201.12	273.22	733.26
	Tanjab Timur	0.04	551.40	1.83	553.27	
	Kawasan Pembangunan	Batanghari	10,466.06	40,244.30	10,344.96	61,055.32
		Bungo	2,377.80	11,376.26	2,372.26	16,126.21
		Kota Jambi	2,100.72	6,727.60	1,991.78	10,820.10
		Muaro Jambi	3,214.30	14,080.44	3,209.50	20,504.24
		Sarolangun	998.75	3,551.48	886.49	4,836.71
		Tanjab Barat	472.85	2,642.28	533.98	3,649.12
		Tanjab Timur	3,694.46	14,881.35	3,635.90	22,211.61
		Tebo	10,055.68	36,984.21	9,960.16	57,000.04
No Data		151.23		151.23		
Tanjab Timur		105.07		105.07		
Grand Total			53,388.38	208,760.94	53,090.04	315,239.36

Legend

- Rencana Jalan Kereta
- Area Rimba
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Ekosistem Penting, 0 - 500m
- Kawasan Ekosistem Penting, 500 - 1000m
- Kawasan Ekosistem Penting, 1000 - 3000m
- Jaringan Ekosistem, 0 - 500m
- Jaringan Ekosistem, 500 - 1000m
- Jaringan Ekosistem, 1000 - 3000m
- Kawasan Pembangunan, 0 - 500m
- Kawasan Pembangunan, 500 - 1000m
- Kawasan Pembangunan, 1000 - 3000m
- No Data, 1000 - 3000m



**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA 2015**

**PERKIRAAN WILAYAH TERKENA DAMPAK
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN
TERHADAP FUNGSI KAWASAN HUTAN**

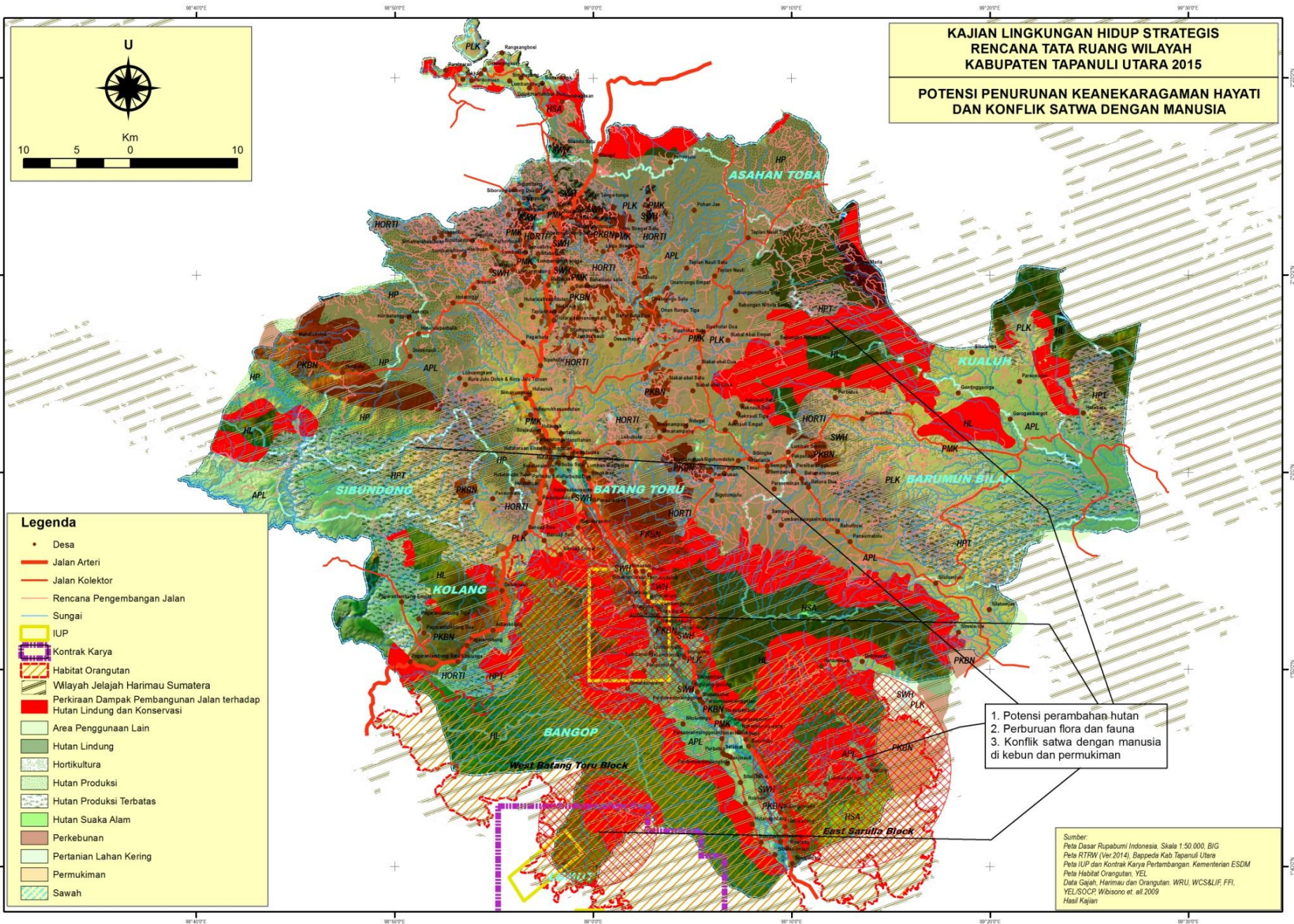
Legenda

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Rencana Pengembangan Jalan
- Dampak Terhadap Hutan Produksi Terbatas
- Dampak Terhadap Hutan Produksi
- Dampak Terhadap Hutan Lindung
- Habitat Orangutan

Sumber:
Peta Fungsi Kawasan Hutan SK No. 579/Menhut-II/2014, KLHK
Peta Habitat Orangutan, YEL
Peta Dasar Rupabumi Indonesia, Skala 1:50.000, BIG
Analisis asumsi perkiraan dampak 2 km dari tepi rencana jalan

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA 2015**

**POTENSI PENURUNAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
DAN KONFLIK SATWA DENGAN MANUSIA**



Legenda

- Desa
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Rencana Pengembangan Jalan
- Sungai
- IUP
- Kontrak Karya
- Habitat Orangutan
- Wilyah Jelajah Harimau Sumatera
- Perkiraan Dampak Pembangunan Jalan terhadap Hutan Lindung dan Konservasi
- Area Penggunaan Lain
- Hutan Lindung
- Hortikultura
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Suaka Alam
- Perkebunan
- Pertanian Lahan Kering
- Pemukiman
- Sawah

1. Potensi perubahan hutan
2. Perburuan flora dan fauna
3. Konflik satwa dengan manusia di kebun dan permukiman

Sumber:
Peta Dasar Rupabumi Indonesia, Skala 1:50.000, BIG
Peta RTRW (Ver 2014), Bappeda Kab. Tapanuli Utara
Peta IUP dan Kontrak Karya Pertambangan, Kementerian ESDM
Peta Habitat Orangutan, YEL
Data Gajah, Harimau dan Orangutan, WRU, WCS&JF, FFI,
YEL/SCOP, Wibisono et. al 2009
Hasil Kajian

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA 2015**

LAHAN KRITIS

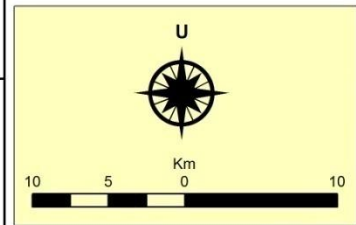
TOBA SAMOSIR

LABUHANBATU UTARA

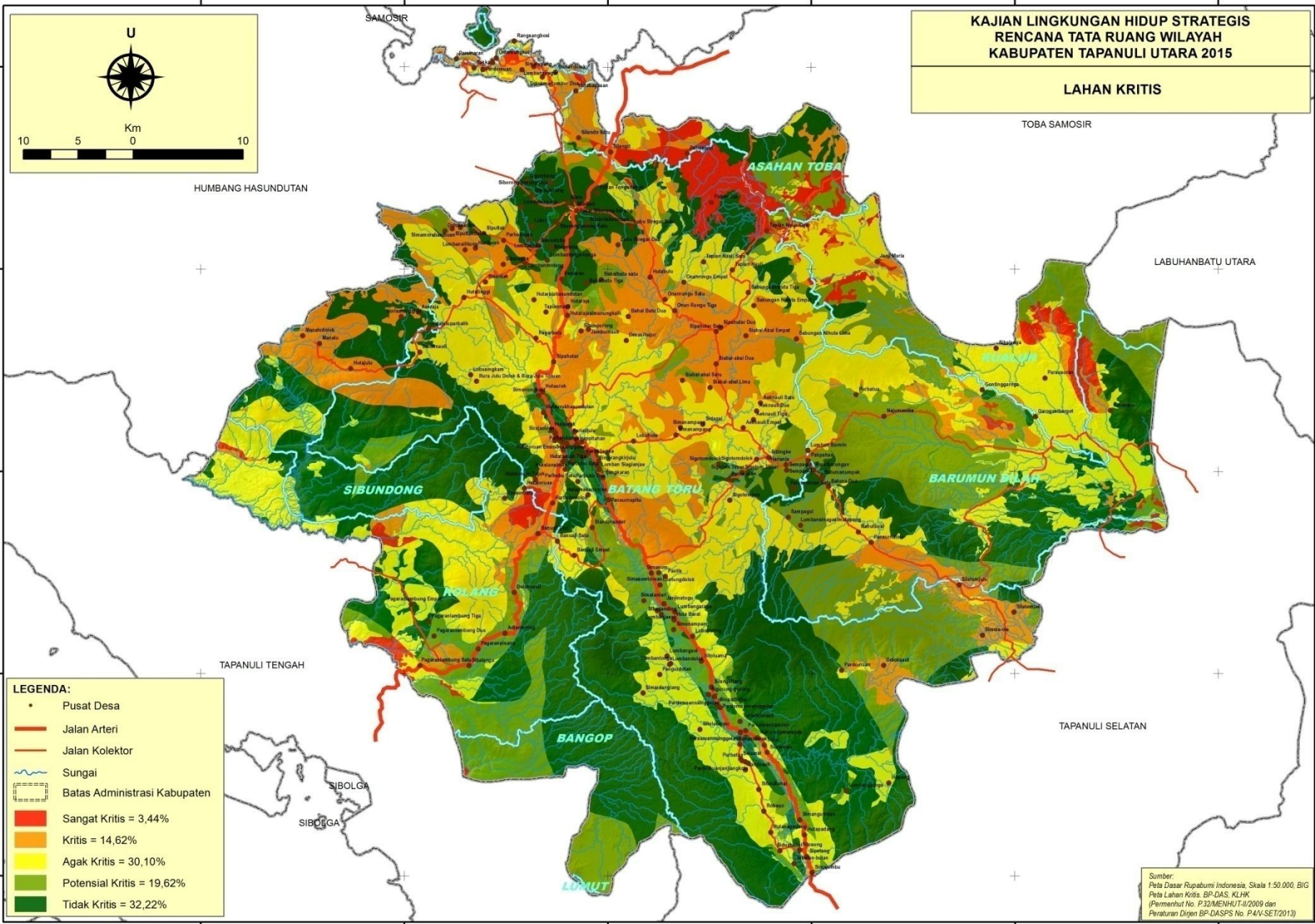
TAPANULI SELATAN

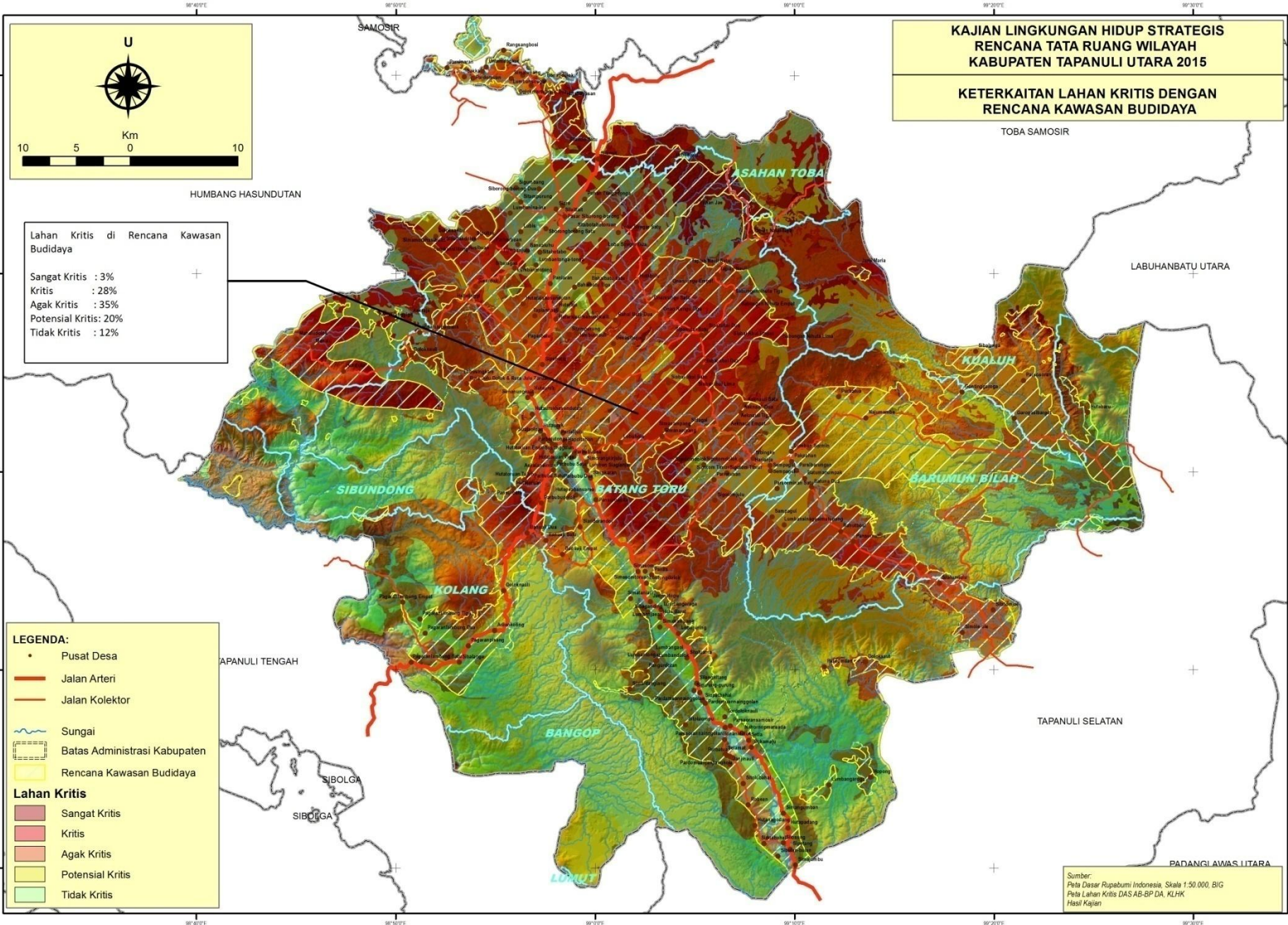
HUMBANG HASUNDUTAN

TAPANULI TENGAH



Sumber:
Peta Dasar Rupabumi Indonesia, Skala 1:50.000, BIG
Peta Lahan Kritis - BP-DAS, KLHK
(Permenhut No. P.32/MENHUT-1/2009 dan
Peraturan Dirjen BP-DASPS No. P.4V-SE/2013)





**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA 2015**

**KETERKAITAN LAHAN KRITIS DENGAN
RENCANA KAWASAN BUDIDAYA**

TOBA SAMOSIR

LABUHANBATU UTARA

TAPANULI SELATAN

PADANGLAWAS LITARA

Lahan Kritis di Rencana Kawasan Budidaya

- Sangat Kritis : 3%
- Kritis : 28%
- Agak Kritis : 35%
- Potensial Kritis: 20%
- Tidak Kritis : 12%

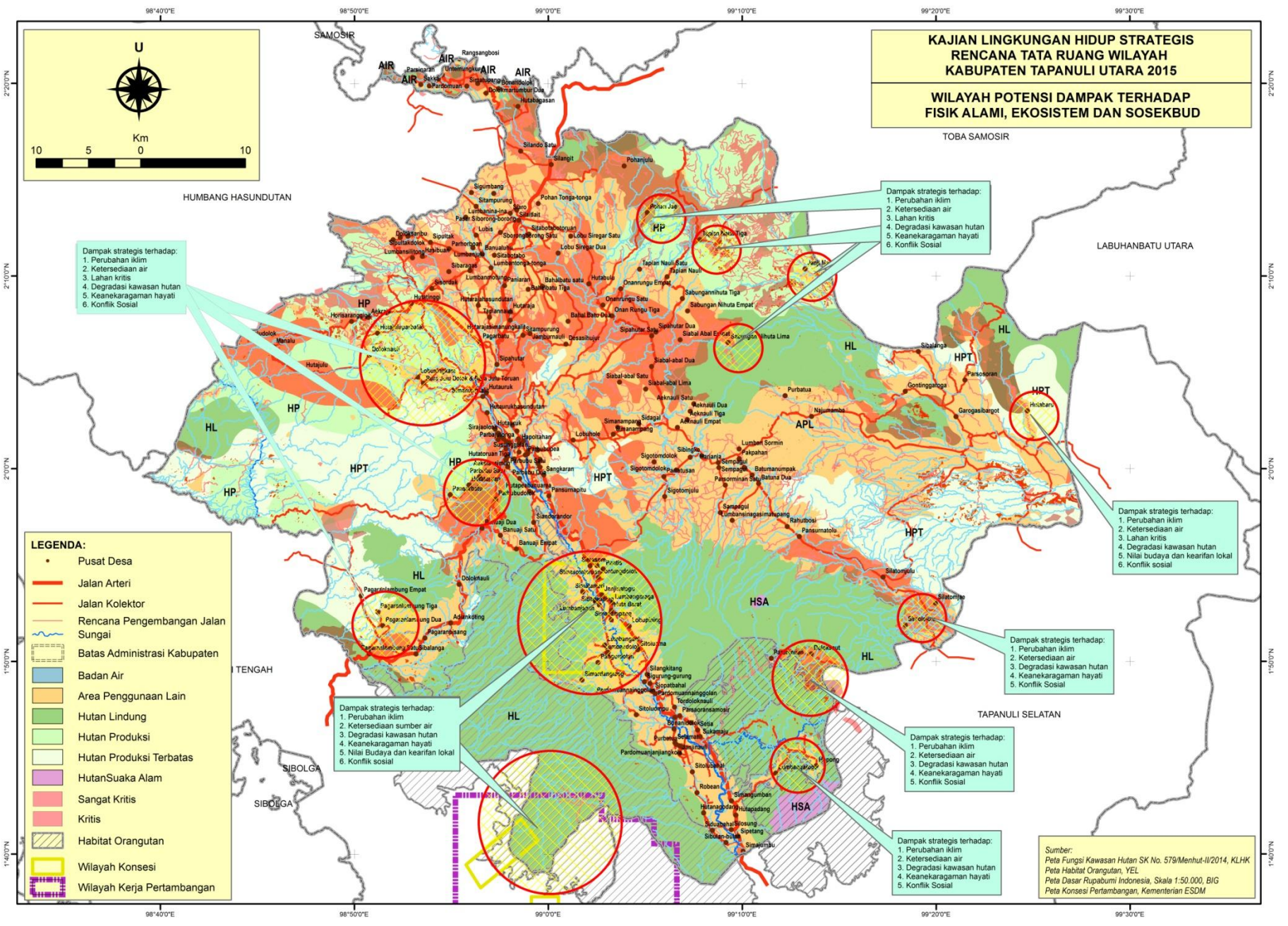
LEGENDA:

- Pusat Desa
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ~ Sungai
- - - Batas Administrasi Kabupaten
- Rencana Kawasan Budidaya

Lahan Kritis

- Sangat Kritis
- Kritis
- Agak Kritis
- Potensial Kritis
- Tidak Kritis

Sumber:
Peta Dasar Rupabumi Indonesia, Skala 1:50.000, BIG
Peta Lahan Kritis DAS AB-BP DA, KLHK
Hasil Kajian



**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA 2015**

**WILAYAH POTENSI DAMPAK TERHADAP
FISIK ALAMI, EKOSISTEM DAN SOSEKBD**

TOBA SAMOSIR

LABUHANBATU UTARA

TAPANULI SELATAN

Dampak strategis terhadap:
1. Perubahan iklim
2. Ketersediaan air
3. Lahan kritis
4. Degradasi kawasan hutan
5. Keanekaragaman hayati
6. Konflik Sosial

Dampak strategis terhadap:
1. Perubahan iklim
2. Ketersediaan air
3. Lahan kritis
4. Degradasi kawasan hutan
5. Keanekaragaman hayati
6. Konflik Sosial

Dampak strategis terhadap:
1. Perubahan iklim
2. Ketersediaan air
3. Lahan kritis
4. Degradasi kawasan hutan
5. Nilai budaya dan kearifan lokal
6. Konflik sosial

Dampak strategis terhadap:
1. Perubahan iklim
2. Ketersediaan air
3. Degradasi kawasan hutan
4. Keanekaragaman hayati
5. Konflik Sosial

Dampak strategis terhadap:
1. Perubahan iklim
2. Ketersediaan sumber air
3. Degradasi kawasan hutan
4. Keanekaragaman hayati
5. Nilai Budaya dan kearifan lokal
6. Konflik sosial

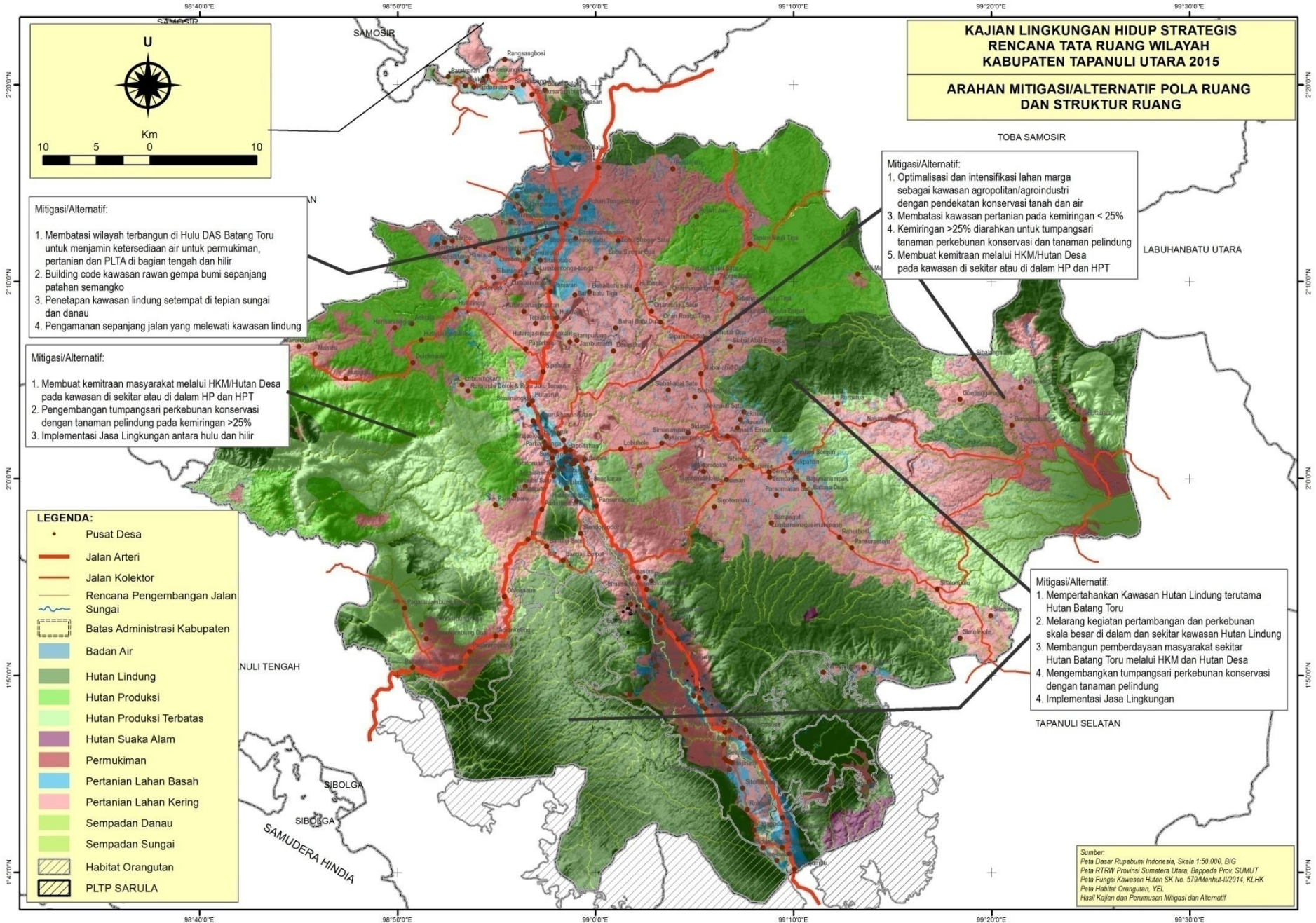
Dampak strategis terhadap:
1. Perubahan iklim
2. Ketersediaan air
3. Degradasi kawasan hutan
4. Keanekaragaman hayati
5. Konflik Sosial

Dampak strategis terhadap:
1. Perubahan iklim
2. Ketersediaan air
3. Degradasi kawasan hutan
4. Keanekaragaman hayati
5. Konflik Sosial

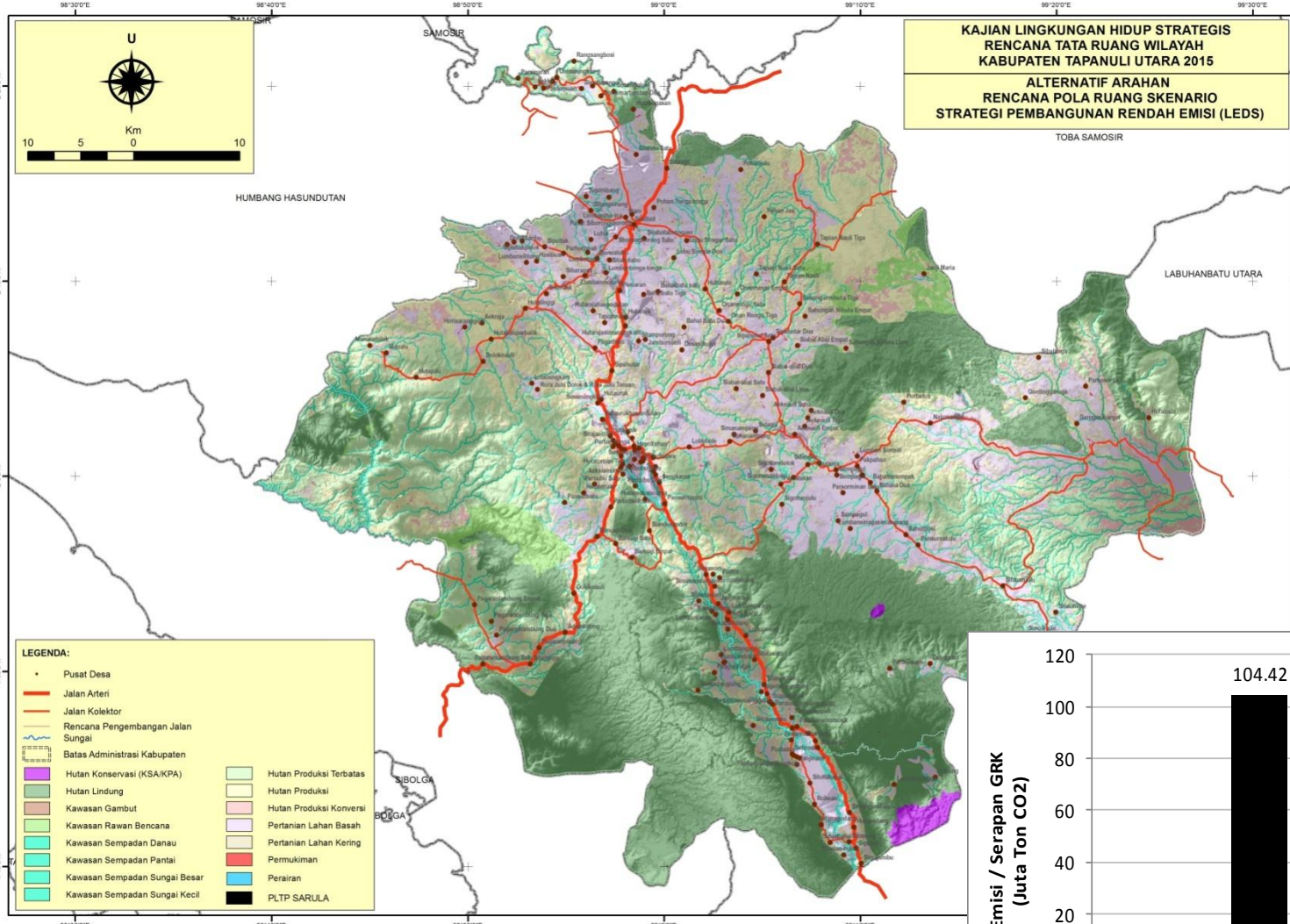
- LEGENDA:**
- Pusat Desa
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Rencana Pengembangan Jalan
 - Sungai
 - Batas Administrasi Kabupaten
 - Badan Air
 - Area Penggunaan Lain
 - Hutan Lindung
 - Hutan Produksi
 - Hutan Produksi Terbatas
 - Hutan Suaka Alam
 - Sangat Kritis
 - Kritis
 - Habitat Orangutan
 - Wilayah Konsesi
 - Wilayah Kerja Pertambangan

Sumber:
Peta Fungsi Kawasan Hutan SK No. 579/Menhut-II/2014, KLHK
Peta Habitat Orangutan, YEL
Peta Dasar Rupabumi Indonesia, Skala 1:50.000, BIG
Peta Konsesi Pertambangan, Kementerian ESDM

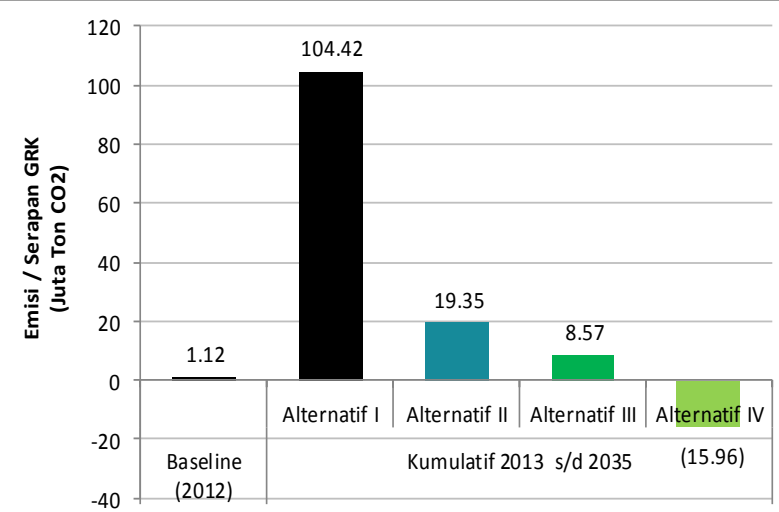
USULAN LANGKAH MITIGASI



ALTERNATIF POLA RUANG DENGAN PENGARUSUTAMAAN SPRE (ALTERNATIF 4)



- Alternatif Pola Ruang ini perlu dikonsultasikan kepada semua Pemangku Kepentingan terkait untuk menghasilkan Rencana Pola Ruang terbaik



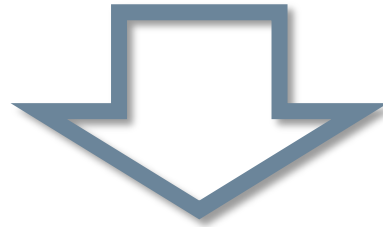
KERJA KELOMPOK

- **Pokja dibagi menjadi 3 kelompok**
 - Setiap kelompok memilih fasilitator dan pendokumentasi diskusi
 - Diskusi menggunakan notebook, Proyektor LCD dan layar proyektor
- **Fasilitator memfasilitasi jalannya diskusi dan pendokumentasi mencatat proses dan hasil diskusi**
 - Mulailah dengan meng-copy file yang telah disediakan narasumber ke dalam notebook kerja
 - Mulailah diskusi untuk memberikan nilai keterkaitan antara indikasi program prioritas RPJMD terhadap isu strategis menggunakan simbol “(-),(0),(+),(?)”
 - CARILAH KONSENSUS untuk menentukan nilainya
 - Setelah mencapai konsensus, pisahkan indikasi program yang bernilai (-) dan pindahkan ke tabel kajian yang disediakan narasumber.
 - Lanjutkan dengan mengidentifikasi perkiraan dampak dari indikasi program yang bernilai (-) terhadap isu strategis.
 - Perkirakan secara umum saja, tidak perlu detail dan identifikasikan keperluan data, informasi dan analisis yang diperlukan lebih lanjut
- **Presentasikan hasil kerja kelompok**
- **Jika bingung silahkan minta bantuan narasumber**

Tabel Kajian dan Mitigasi

ISU STRATEGIS	PENGKAJIAN PENGARUH				LOKASI	Visi & Misi RPJMD	MITIGASI
	Deskripsi Dampak	Turunan	Antara Wil	Kumulatif			

SELANJUTNYA.....



**MODUL
TAHAP PERUMUSAN REKOMENDASI
KLHS**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MODUL 5

TAHAP PERUMUSAN REKOMENDASI

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

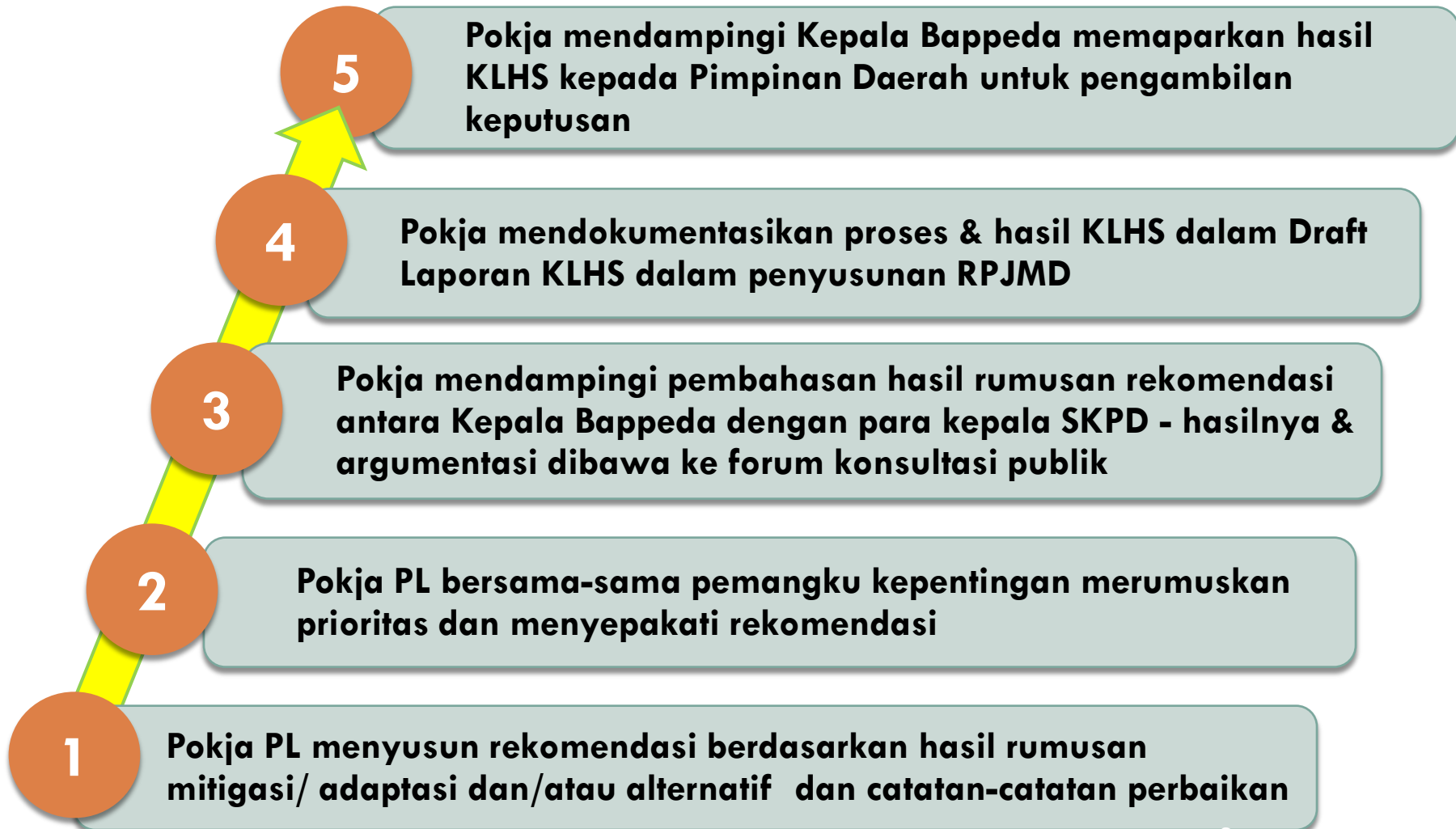
PELATIHAN KLHS RPJMD
Jogjakarta, 22 – 24 MARET 2016



TUJUAN

- ▶ Menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan mitigasi dan/atau alternatif yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya untuk penyempurnaan rumusan rancangan RPJMD.

MERUMUSKAN REKOMENDASI KLHS





No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Perumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
1	Pembangunan jalan untuk jalur angkutan barang terpisah dari jalur transportasi umum (Ps. 50 ayat 2)	Dampak terhadap penggunaan lahan sawah	NA	Pembangunan jalan layang pada wilayah persawahan	Pembangunan jalan transportasi barang terpisah dari jalur transportasi umum yang mempertimbangkan mitigasi dampak terhadap lingkungan dan sosial
		Dampak terhadap perumahan yang telah terbangun	Program permukiman kembali penduduk	Penyesuaian trase badan jalan di kawasan terbangun	
2	Revitalisasi kawasan kota lam (Pasal 60 ayat 2d)	Menimbulkan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat	Konsolidasi tanah di kawasan revitalisasi	NA	
		Menimbulkan dampak terhadap pola permukiman	Konsolidasi tanah di kawasan revitalisasi	NA	
3	Pembangunan jalan arteri primer (Ps. 60 4d)	Dampak terhadap penggunaan lahan sawah	NA	Pengalihan trase jalan	Pembangunan jalan arteri primer dengan tidak mengganggu kawasan pertanian produktif dan kawasan lahan basah dan lindung
		Dampak terhadap lahan basah	NA	Pembangunan jalan layang pada wilayah lahan basah	
		Dampak terhadap kawasan cagar alam	NA	Pengalihan trase jalan	

Contoh Rekomendasi KLHS RTRW Kab. Tapanuli Utara

- 1. Melindungi keutuhan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang dimiliki di antaranya dengan mengembangkan ekowisata dan membangun Arboretum**
- 2. Memberi komitmen kuat untuk menggalakkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah-wilayah sempadan sungai dan sumber-sumber mata air**
- 3. Mendorong implementasi kebijakan Imbal Jasa Lingkungan dari para pihak yang menikmati manfaatnya**
- 4. Menjadikan faktor topografi dan resiko bencana sebagai landasan/pertimbangan penting di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan**
- 5. Menggalakkan sistem Pertanian Lestari dalam pembangunan usaha tani dan pemanfaatan lahan kritis untuk pertanian melalui kegiatan reklamasi dan peternakan**
- 6. Memperhatikan aspek sosial budaya (termasuk keberadaan masyarakat/hutan adat) di dalam finalisasi, penetapan, dan pelaksanaan RTRW**
- 7. Mengarusutamakan strategi pembangunan rendah emisi dalam penyusunan kebijakan, rencana dan program Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan mengutamakan pemanfaatan data geospasial dalam pengambilan keputusan strategis**
- 8. Melakukan kegiatan pembangunan basis data geospasial Kabupaten Tapanuli Utara sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan mempublikasikannya kepada publik sebagai bagian dari kebijakan nasional One-Map Policy**

Contoh Rekomendasi KLHS RTRW Kab. Hulu Sungai Utara

- 1. Pembangunan atau pengembangan polder, pengembangan kota Amuntai, dan penambahan sarana serta prasarana baik melalui sistem pengolahan on site atau sistem skema bantuan lain, harus dilakukan melalui perencanaan yang menyeluruh, harmonis, sinkron, dan terintegrasi dengan rumusan program kerja sektor terkait lainnya yang telah ditetapkan di HSU.**
- 2. Penetapan produk unggulan daerah, pemerintah HSU adalah a) itik alabio dan kerbau rawa sebagai bagian dari produk unggulan yang unik atau spesifik spesies lokal sehingga dengan demikian perlu dilestarikan, b) pengembangan kreatif dan inovatif bagi produk-produk unggulan diperlukan untuk menjamin keberlanjutan keunggulannya, yaitu terus meningkatkan keunggulan ekonomi maupun kelestarian bahan dasar utamanya yaitu ekosistem rawa berikut habitatnya, c) menetapkan kawasan sentra peternakan murni itik alabio di dalam rumusan RTRW, seperti di Desa Mamar, dan kawasan peternakan kerbau rawa di Kecamatan Danau Rawa dan Kecamatan Paminggir agar tidak terjadi konflik dengan pertanian tanaman pangan.**
- 3. Pelaksanaan intensifikasi melalui pemilihan teknologi yang tepat dalam pengelolaan air lahan rawa pada perkebunan sawit existing di Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Banjang agar dampak negatif yang terjadi bisa diminimalisir.**
- 4. Pemberian ijin pembukaan perkebunan sawit yang baru diperlukan: a) studi kelayakan berbasis rawa, b) pemilihan teknologi yang tepat untuk mengelola lahan rawa, c) penundaan perijinan atau peninjauan kembali bagi lahan yang mempunyai kedalaman gambut lebih dari 3 meter, atau d) penggantian komoditas, seperti sawit menjadi jelutung, untuk memelihara ekosistem rawa dan sekaligus memberikan potensi manfaat ekonomis yang lebih baik.**
- 5. Kegiatan pembangunan fisik, pemerintah HSU harus a) mempertimbangkan kelengkapan dokumen administrasi dan teknis, terutama dokumen tata kelola lingkungan, b) melaksanakan pengawasan, serta c) melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah kabupaten terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam rangka mengurangi resiko lingkungan.**
- 6. Pengendalian bencana banjir, pemerintah HSU harus melibatkan pemerintah kabupaten tetangga, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah pusat dalam konteks fungsi ekologis HSU.**
- 7. Menindaklanjuti butir-butir di atas menjadi usulan-usulan program prioritas pada RPJMD dan menjadi acuan dasar pada saat perumusan Rencana Strategis SKPD Bappeda, Pekerjaan Umum, dan Pertanian serta BLHD atau Kantor LH.**

BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Pada Hari ini Kamis tanggal 17 (Tujuh Belas) Bulan Desember Tahun dua ribu lima belas, bertempat di Aula/Ruang Balai Data Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, pada pukul 09.30 - 13.00 WIB telah dilaksanakan kegiatan Serah Terima Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun rekomendasi utama yang termuat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

1. Melindungi keutuhan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang dimiliki di antaranya dengan mengembangkan ekowisata dan membangun Arboretum
2. Memberi komitmen kuat untuk menggalakkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah-wilayah sempadan sungai dan sumber-sumber mata air
3. Mendorong implementasi kebijakan Imbal Jasa Lingkungan dari para pihak yang menikmati manfaatnya
4. Menjadikan faktor topografi dan resiko bencana sebagai landasan/pertimbangan penting di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
5. Menggalakkan sistem Pertanian Lestari dalam pembangunan usaha tani dan pemanfaatan lahan kritis untuk pertanian melalui kegiatan reklamasi dan peternakan
6. Memperhatikan aspek sosial budaya (termasuk keberadaan masyarakat/hutan adat) di dalam finalisasi, penetapan, dan pelaksanaan RTRW
7. Mengarusutamakan strategi pembangunan rendah emisi dalam penyusunan kebijakan, rencana dan program Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan mengutamakan pemanfaatan data geospasial dalam pengambilan keputusan strategis
8. Melakukan kegiatan pembangunan basis data geospasial Kabupaten Tapanuli Utara sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan mempublikasikannya kepada publik sebagai bagian dari kebijakan nasional One-Map Policy

Tindak lanjut yang diperlukan setelah Serah Terima Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) RTRW Kabupaten Tapanuli Utara yaitu

Mengintegrasikan Rekomendasi KLHS ke dalam Rancangan RTRW Kabupaten Tapanuli Utara

Tarutung, 17 Desember 2015



Contoh Berita Acara Pengambilan Keputusan Rekomendasi KLHS RTRW Kab. Tapanuli Utara



PELAPORAN

Pelaporan KLHS RPJMD

-  **Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan bertanggung jawab mendokumentasikan seluruh proses dan hasil pelaksanaan KLHS RPJMD ke dalam Laporan KLHS.**
-  **Laporan KLHS merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Rancangan Akhir RPJMD.**
-  **Gubernur menyertakan Laporan KLHS RPJMD Provinsi pada saat konsultasi Rancangan RPJMD kepada Menteri Dalam Negeri.**
-  **Bupati/Walikota menyertakan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten/Kota pada saat konsultasi Rancangan RPJMD kepada Gubernur**

Laporan KLHS RPJMD

- ▶ LAPORAN PELINGKUPAN:
 - Hasil Pelingkupan
 - Hasil Analisis Baseline Data
 - Rancangan Pengkajian Pengaruh
- ▶ RANCANGAN LAPORAN AKHIR
 - Laporan Pelingkupan
 - Hasil Pengkajian Pengaruh
 - Hasil Perumusan Mitigasi/Alternatif
 - Hasil Perumusan Rekomendasi
- ▶ LAPORAN AKHIR
 - Rancangan Laporan Akhir
 - Hasil Pengambilan Keputusan
 - Hasil Pengintegrasian ke dalam Rancangan RPJMD

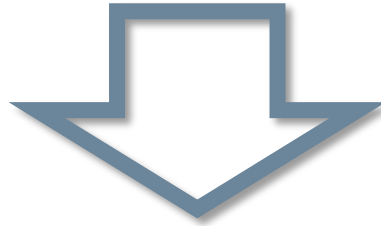
Semua catatan terkait konsultasi publik, FGD dan rapat-rapat terkait substansi KLHS dilampirkan dalam laporan

Format LAPORAN disesuaikan dengan proses KLHS yang telah dilakukan



Laporan KLHS merupakan dokumen publik yang harus dapat diakses oleh pemangku kepentingan

SELANJUTNYA.....



**MODUL
PENGENDALIAN**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

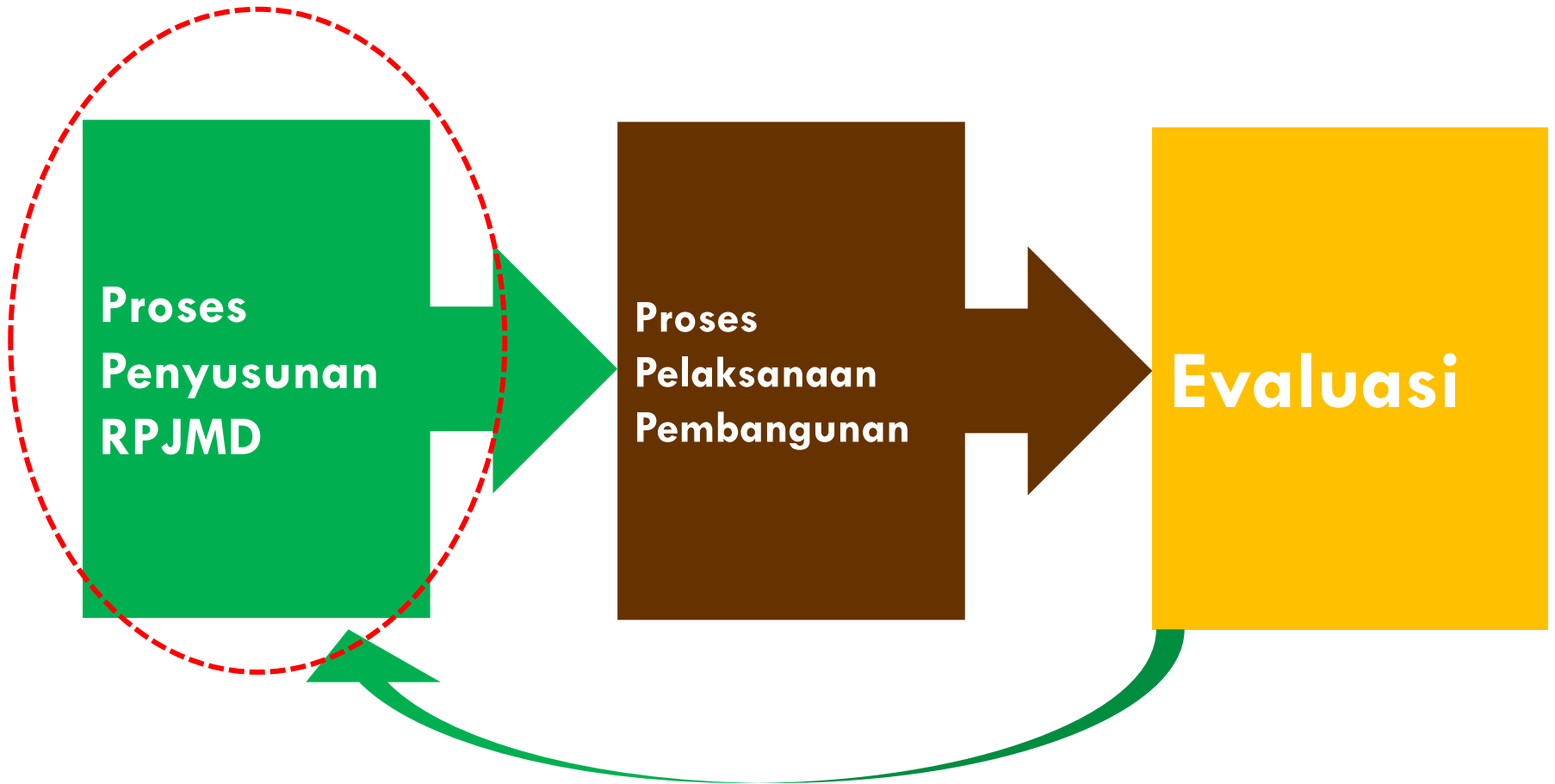
MODUL 6

TAHAP PENGENDALIAN & EVALUASI

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

PELATIHAN KLHS RPJMD
Jogjakarta, 22 – 24 MARET 2016

FASE PENGENDALIAN DAN EVALUASI



TUJUAN PENGENDALIAN

A horizontal bar with an orange segment on the left and a light blue segment on the right. A light blue circle is positioned at the start of the light blue segment. Below the bar, there are four circles of varying sizes and shades of blue, arranged in a descending staircase pattern from left to right.

Untuk memastikan bahwa proses dan hasil KLHS telah sesuai dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD sebagaimana diatur dalam peraturan

Pejabat Penilai

Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengendalian pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD

Instrumen Pengendalian: (a)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
1.						
	1.1 Membentuk Pokja PL yang komposisi keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan daerah.					
	1.2 Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang meliputi: (a) latar belakang, (b) tujuan dan sasaran, (c) lingkup kegiatan, (d) hasil yang diharapkan, (e) rencana kerja dan metode pengkajian, (f) tenaga ahli yang diperlukan, dan (g) waktu dan pembiayaan.					
	1.3 Mengidentifikasi dan melibatkan narasumber yang sesuai dengan cakupan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan.					

*Nilai:

1 = Tercakup Sepenuhnya

2 = Tercakup Sebagian Besar

3 = Tercakup Sebagian Kecil

4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

**Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan

Instrumen Pengendalian: (b)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
	1.4 Melakukan Pra-Pelingkupan untuk memperoleh daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu lingkungan, isu sosial budaya, isu ekonomi)					
	1.5 Mengidentifikasi dan menganalisis Pemangku Kepentingan sesuai dengan cakupan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus kajian.					

*Nilai:

1 = Tercakup Sepenuhnya

2 = Tercakup Sebagian Besar

3 = Tercakup Sebagian Kecil

4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

**Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan

Instrumen Pengendalian: (c)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
2						
	2.1 Melakukan Pelingkupan: <ul style="list-style-type: none"> a. Memverifikasi daftar panjang Isu-Isu Pembangunan berkelanjutan; b. Menapis daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek Isu-isu Pembangunan; c. Menetapkan Isu-Isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus KLHS; d. Menetapkan lingkup wilayah dan lingkup waktu dari huruf c. 					

*Nilai:

1 = Tercakup Sepenuhnya

2 = Tercakup Sebagian Besar

3 = Tercakup Sebagian Kecil

4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

**Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan

Instrumen Pengendalian: (d)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
	<p>2.2 Pengumpulan dan Analisis Baseline Data:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Faktor pendorong terjadinya isu;b. Penyajian Data dan Informasi dalam bentuk baseline data yang menjelaskan: (a) posisi awal isu berikut pola kecenderungan di masa lalu sampai masa kini, dan (b) prediksi ke depan kecenderungan isu-isu pembangunan berkelanjutan apabila RPJMD belum mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.					

*Nilai:

1 = Tercakup Sepenuhnya

2 = Tercakup Sebagian Besar

3 = Tercakup Sebagian Kecil

4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

**Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan

Instrumen Pengendalian: (e)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
	<p>2.3 Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup kajian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengkaji Prinsip Keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor, antar pemangku kepentingan);b. Mengkaji Prinsip Keseimbangan (ekonomi, sosial, lingkungan hidup);c. Mengkaji Prinsip Keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar generasi);					

*Nilai:

1 = Tercakup Sepenuhnya

2 = Tercakup Sebagian Besar

3 = Tercakup Sebagian Kecil

4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

**Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan

Instrumen Pengendalian: (f)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
	<p>2.4 Pengkajian Pengaruh Indikasi Program Prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengkaji pengaruh indikasi program prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan meliputi (1) Identifikasi dan penentuan program prioritas yang akan dikaji; (2) Pengkajian pengaruh program prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan; dan (3) Merangkum hasil kajian;b. Mengidentifikasi tempat/lokasi yang sensitif terhadap pengaruh hasil kajian huruf a di atas, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG);c. Memverifikasi hasil huruf a dan b dengan para pakar untuk memperoleh pandangan pakar (expert judgement) dalam memastikan terpenuhinya/terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan;					

Instrumen Pengendalian: (g)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
	<p>2.5. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif penajaman rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah.</p> <p>a. Memperhatikan kesimpulan kajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, dan kajian pengaruh indikasi program prioritas terhadap daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan sebagai rujukan dalam merumuskan mitigasi dan/atau alternatif;</p> <p>b. Merumuskan Mitigasi/Adaptasi dan/atau alternatif</p>					

Instrumen Pengendalian: (h)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
	<p>2.6. Perumusan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan dalam Penyusunan RPJMD yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif;b. Menyampaikan rumusan rekomendasi kepada pemangku kepentingan, memprioritaskan dan menyepakati rekomendasi;c. Mengonsultasikan dan menyepakati substansi rekomendasi bersama SKPD;d. Menyusun draft laporan KLHS;e. Mengintegrasikan kesepakatan substansi rekomendasi ke rancangan awal RPJMD bersama Tim Penyusun RPJMD.					

Instrumen Pengendalian: (i)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
3	Peranserta Pemangku Kepentingan					
	3.1. Pelibatan seluruh unsur pemangku kepentingan yang relevan (pemerintah, organisasi non pemerintah, akademia, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan)					
	3.2. Pelibatan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLHS: a. Pelingkupan, b. Baseline data, c. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan d. Pengkajian Pengaruh e. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif f. Perumusan Rekomendasi					

Hasil Pengendalian untuk Penyusunan RPJMD



Hasil Pengendalian



Disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai pembelajaran untuk penyempurnaan kegiatan KLHS selanjutnya



TERIMA KASIH



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

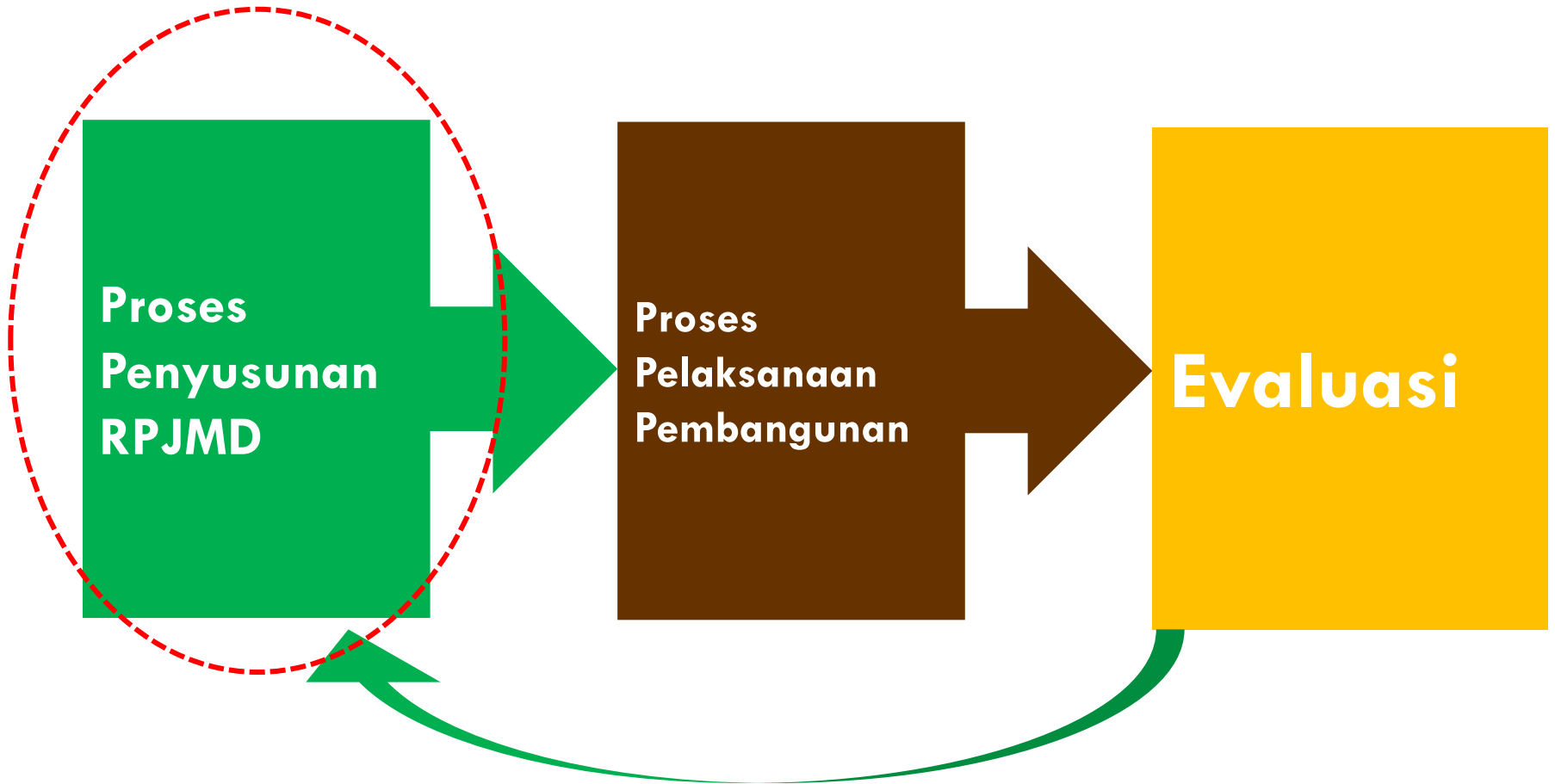
MODUL 6

TAHAP PENGENDALIAN & EVALUASI

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

PELATIHAN KLHS RPJMD
Jogjakarta, 22 – 24 MARET 2016

FASE PENGENDALIAN DAN EVALUASI



TUJUAN PENGENDALIAN

A decorative graphic consisting of a horizontal bar with an orange segment on the left and a light blue segment on the right. Below the bar, there are four circles of varying sizes and shades of blue, arranged in a descending staircase pattern from top-left to bottom-right.

Untuk memastikan bahwa proses dan hasil KLHS telah sesuai dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD sebagaimana diatur dalam peraturan

Pejabat Penilai

Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengendalian pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD

Instrumen Pengendalian: (a)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
1.						
	1.1 Membentuk Pokja PL yang komposisi keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan daerah.					
	1.2 Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang meliputi: (a) latar belakang, (b) tujuan dan sasaran, (c) lingkup kegiatan, (d) hasil yang diharapkan, (e) rencana kerja dan metode pengkajian, (f) tenaga ahli yang diperlukan, dan (g) waktu dan pembiayaan.					
	1.3 Mengidentifikasi dan melibatkan narasumber yang sesuai dengan cakupan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan.					

*Nilai:

1 = Tercakup Sepenuhnya

2 = Tercakup Sebagian Besar

3 = Tercakup Sebagian Kecil

4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

**Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan

Instrumen Pengendalian: (b)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
	1.4 Melakukan Pra-Pelingkupan untuk memperoleh daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu lingkungan, isu sosial budaya, isu ekonomi)					
	1.5 Mengidentifikasi dan menganalisis Pemangku Kepentingan sesuai dengan cakupan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus kajian.					

*Nilai:

1 = Tercakup Sepenuhnya

2 = Tercakup Sebagian Besar

3 = Tercakup Sebagian Kecil

4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

**Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan

Instrumen Pengendalian: (c)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
2						
	2.1 Melakukan Pelingkupan: <ul style="list-style-type: none"> a. Memverifikasi daftar panjang Isu-Isu Pembangunan berkelanjutan; b. Menapis daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek Isu-isu Pembangunan; c. Menetapkan Isu-Isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus KLHS; d. Menetapkan lingkup wilayah dan lingkup waktu dari huruf c. 					

*Nilai:

1 = Tercakup Sepenuhnya

2 = Tercakup Sebagian Besar

3 = Tercakup Sebagian Kecil

4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

**Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan

Instrumen Pengendalian: (d)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
	<p>2.2 Pengumpulan dan Analisis Baseline Data:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Faktor pendorong terjadinya isu;b. Penyajian Data dan Informasi dalam bentuk baseline data yang menjelaskan: (a) posisi awal isu berikut pola kecenderungan di masa lalu sampai masa kini, dan (b) prediksi ke depan kecenderungan isu-isu pembangunan berkelanjutan apabila RPJMD belum mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.					

*Nilai:

1 = Tercakup Sepenuhnya

2 = Tercakup Sebagian Besar

3 = Tercakup Sebagian Kecil

4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

**Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan

Instrumen Pengendalian: (e)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
	<p>2.3 Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup kajian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengkaji Prinsip Keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor, antar pemangku kepentingan);b. Mengkaji Prinsip Keseimbangan (ekonomi, sosial, lingkungan hidup);c. Mengkaji Prinsip Keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar generasi);					

*Nilai:

1 = Tercakup Sepenuhnya

2 = Tercakup Sebagian Besar

3 = Tercakup Sebagian Kecil

4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

**Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan

Instrumen Pengendalian: (f)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
	<p>2.4 Pengkajian Pengaruh Indikasi Program Prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengkaji pengaruh indikasi program prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan meliputi (1) Identifikasi dan penentuan program prioritas yang akan dikaji; (2) Pengkajian pengaruh program prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan; dan (3) Merangkum hasil kajian;b. Mengidentifikasi tempat/lokasi yang sensitif terhadap pengaruh hasil kajian huruf a di atas, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG);c. Memverifikasi hasil huruf a dan b dengan para pakar untuk memperoleh pandangan pakar (expert judgement) dalam memastikan terpenuhinya/terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan;					

Instrumen Pengendalian: (g)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
	<p>2.5. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif penajaman rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah.</p> <p>a. Memperhatikan kesimpulan kajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, dan kajian pengaruh indikasi program prioritas terhadap daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan sebagai rujukan dalam merumuskan mitigasi dan/atau alternatif;</p> <p>b. Merumuskan Mitigasi/Adaptasi dan/atau alternatif</p>					

Instrumen Pengendalian: (h)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
	<p>2.6. Perumusan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan dalam Penyusunan RPJMD yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif;b. Menyampaikan rumusan rekomendasi kepada pemangku kepentingan, memprioritaskan dan menyepakati rekomendasi;c. Mengonsultasikan dan menyepakati substansi rekomendasi bersama SKPD;d. Menyusun draft laporan KLHS;e. Mengintegrasikan kesepakatan substansi rekomendasi ke rancangan awal RPJMD bersama Tim Penyusun RPJMD.					

Instrumen Pengendalian: (i)

No	Kegiatan	Nilai *				Keterangan **
		1	2	3	4	
3	Peranserta Pemangku Kepentingan					
	3.1. Pelibatan seluruh unsur pemangku kepentingan yang relevan (pemerintah, organisasi non pemerintah, akademika, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan)					
	3.2. Pelibatan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLHS: a. Pelingkupan, b. Baseline data, c. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan d. Pengkajian Pengaruh e. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif f. Perumusan Rekomendasi					

Hasil Pengendalian untuk Penyusunan RPJMD



Hasil Pengendalian



Disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai pembelajaran untuk penyempurnaan kegiatan KLHS selanjutnya



TERIMA KASIH